

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian Analisis Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 mengalami kestabilan dan penurunan yang diukur dengan menggunakan indeks Williamson dan indeks Entropi Theil. Ketimpangan pendapatan yang tinggi terjadi selama tiga tahun, yaitu tahun 2012 hingga 2014.
2. Berdasarkan analisis indeks Williamson, ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 menunjukkan pada level ketimpangan yang tinggi dengan nilai rata-rata sebesar $0,62 > 0,5$. Dengan rincian, tahun 2012 hingga 2014 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan dengan nilai indeks sebesar 0,63. Pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 0,02 menjadi 0,61, kemudian terus mengalami penurunan 0,01 di tahun 2016 menjadi 0,60.
3. Berdasarkan analisis indeks Entropi Theil, terjadi ketidakmerataan PDRB ADHK di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 dengan nilai rata-rata indeks $0,154 > 0$. Tahun 2012 indeks Entropi Theil sebesar 0,16, tahun 2013 hingga 2014 nilai indeks tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Setelah tahun 2014, terjadi penurunan di

tahun 2015 dengan nilai indeks 0,15. Pada tahun 2016, nilai indeks Entropi Theil kembali menunjukkan penurunan menjadi 0,14.

B. Saran

Berdasarkan penelitian Analisis Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016, maka saran hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2013 termasuk dalam kategori tinggi sehingga perlu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan ekonomi maupun non ekonomi yang saling mendukung agar ketimpangan pendapatan dapat membaik sehingga pendistribusiannya dapat lebih merata.
2. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau wilayah yang tergolong tertinggal perlu diberikan kemudahan akses dalam pembangunan yang dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu sosial, ekonomi, serta infrastruktur.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang biasa diukur melalui PDRB per kapita perlu diikuti dengan meratanya sektor perekonomian di semua wilayah pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan partisipasi tenaga kerja di semua daerah juga perlu diperhatikan guna pemerataan penduduk dan pencegahan tingginya tingkat arus urbanisasi.